

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yang di tandai dengan adanya Pemilihan umum (Pemilu) yang melibatkan masyarakat untuk memilih secara langsung baik pemilihan Kepala Negara, kepala Daerah, hingga pemilihan Legislatif. Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang menaruh kebebasan pada masyarakat dalam menentukan pemimpin, baik pemimpin Negara maupun pemimpin Daerah. Demikian pentingnya hal tersebut memberikan peluang bagi warga negara Indonesia untuk dipilih dan memilih. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan sebagai Kepala Daerah dengan memberikan kebebasan besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut serta berkompetisi dalam penempatan jabatan publik yang dipilih¹.

Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di pilih secara demokratis². Pemilihan umum Kepala Daerah atau yang sering Disebut Pemilukada adalah bentuk demokrasi. Pemilukada adalah pemilihan langsung pemimpin Eksekutif Daerah, dari Walikota, Bupati, sampai Gubernur. Dalam Pilkada tersebut menunjukkan proses demokrasi secara *procedural* dan *substansial* dengan cara memilih orang, dan kemenangan orang tersebut akan di tentukan oleh siapa yang akan memperoleh suara terbanyak.

¹ Tawakkal Baharuddin, 'Modalitas Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015', (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Journal of Governance And Public Policy, Volume.4 No.1 February 2017), hlm. 211.

² Suharizal, 'Pemilukada', (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 26.

Keterlibatan masyarakat Indonesia dalam Pemilukada tentu memberi manfaat bagi daerah mereka masing-masing. Bahwasanya mereka yang di pilih, merupakan representasi dari mereka-mereka yang memilih untuk hal kemajuan Daerah mereka masing-masing. Artinya yang menentukan 5 tahun kedepan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan daerahnya³.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah menjadi agenda yang penting untuk menyalurkan hak pilih dalam memilih Kepala Daerah secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung sesuai penilaian masyarakat untuk memimpin suatu daerah dalam waktu lima tahun. Sistem pemilihan yang awalnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini dipilih langsung oleh rakyat yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pergeseran mekanisme dari sistem perwakilan ke sistem langsung telah mengharuskan masyarakat untuk dapat berpartisipasi menegakkan demokrasi dengan seadil-adilnya melalui ikut serta dalam pemilihan kepala daerah⁴.

Di Indonesia pemberian hak kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam berpolitik, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memberi kebebasan kepada setiap warga negara sehingga mendapatkan kesejahteraan. Melalui kesejahteraan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. Agar dapat mampu meningkatkan daya saing. Kesetaraan yang dimaksud adalah tidak ada perbedaan perlakuan hak politik Perempuan dan Laki-laki. Peran Perempuan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran berpolitik, mampu bertindak sebagai penggagas dalam

³ Iqbal Aidar Idrus, '*Pilkada Serentak tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Selatan*', (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta: Jurnal Polinter, Volume. 4, No. 1. Maret-Agustus 2018), hlm. 6.

⁴ Saiful Zuhri, '*Analisis Swot Terhadap Kekalahan Petahanan (Mustafa) di Daerah Pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015*', Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2016.

berbagai masalah dan berbagai keluhan yang muncul di masyarakat. Serta mampu menjadi pemantau parpol dan pemerintah terhadap kesetaraan gender⁵.

Perempuan diuntut untuk dapat di libatkan dalam dunia politik, dan setiap Partai Politik wajib memberikan kesempatan pada perempuan untuk bergabung. Berbicara tentang perempuan, akan selalu menjadi hal yang sangat menarik dan hangat untuk diperbincangkan, bukan saja karena sisi perempuannya, melainkan lebih kepada isu-isu yang diusung olehnya, yang senantiasa menjadi titik perbincangan menarik ditengah dunia yang di dominasi oleh kaum laki-laki.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Indonesia, melaksanakan perbuatan hukum mengikat diri pada perjanjian internasional, menciptakan kewajiban dan akuntabilitas Negara untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak asasi perempuan, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi yang telah disahkan oleh undang-undang menjadi sumber hukum dalam arti formal, disamping peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Hal ini dijamin dalam undang-undang RI No. 39 tahun 1999, tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 7 ayat (2) yang menentukan: “Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak azasi manusia menjadi hukum nasional⁶.

Secara konstitusional Laki-laki dan Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28 yang menegaskan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Undang-undang tersebut merupakan cerminan

⁵Rizki Maharani, Mudiwati Rahmatunnisa & LeoAgustino, ‘*Modalitas RA.Anita Noeringhati pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019*’, (Universitas Padjajaran: JUPIIS, 12 february 2020), hlm. 488.

⁶ Referensi HAM, “UUNomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita”(https://referensi.elsam.or.id/diakses Pada Tanggal 30 September 2014.

dari negara demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berkiprah, termasuk Perempuan. Di Indonesia, gambaran peran Perempuan dibidang publik yang terkait dengan politik secara statistik masih belum menggembirakan. Hal itu dapat dicermati dari hasil pemilu dari tahun ke tahun. masih didominasi oleh kaum Laki-laki yang dibuktikan dalam pemerintahan yang kebanyakan adalah Laki-laki sebagai pejabat publik, baik diwilayah Kepresidenan, eksekutif, legislatif dan Yudikatif. Dalam fikih siyasah (Politik) kaum Perempuan sering dipandang tidak berhak menjadi pemimpin sebagai kepala pemerintahan. sehingga dogma-dogma seperti ini menjadi faktor kurangnya partisipasi Perempuan dalam politik. pada saat ini keterwakilan Perempuan masih rendah dibandingkan keterwakilan Laki laki. Ditambah lagi budaya masyarakat Indonesia yang cenderung patriarkis yang mengedepankan Laki laki, dan memandang bahwa politik bukan untuk perempuan. Sehingga hal itu membuat perempuan tidak tertarik dengan politik dan tidak sadar akan diskriminasi hak dan perannya⁷. Berikut tabel jumlah keterwakilan dan anggota DPRD Menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi Jambi:

⁷Ika Kartika, *'Modal Kandidat Perempuan Dalam Pilkada 2017'*, (Jurnal Tapis, Volume. 15 No. 05, Januari-Juni 2019), hlm 91.

Tabel 1.1 Jumlah Dan Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Jambi Periode 2014-2019.

No	Wilayah	Laki Laki	Perempuan	Total
1.	Provinsi Jambi	48	7	55
2.	Kota Jambi	37	8	45
3.	Kota Sungai Penuh	25	-	25
4.	Kabupaten Muaro Jambi	30	5	35
5.	Kabupaten Batanghari	29	6	35
6.	Kabupaten Tanjabtim	25	5	30
7.	Kabupaten Tanjabbar	30	5	35
8.	Kabupaten Sarolangun	28	2	30
9.	Kabupaten Merangin	35	-	35
10.	Kabupaten Tebo	30	5	35
11.	Kabupaten Bungo	29	6	35
12.	Kabupaten Kerinci	34	1	35
Total		348	36	348
Presentase		90,6%	9,4%	-

Sumber: DPRD Provinsi Jambi Tahun 2014 Dan Tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa keterwakilan perempuan di Provinsi Jambi masih sangat jauh jika dibandingkan dengan keterwakilan laki laki. Hal tersebut terlihat pada periode tahun 2014-2019 jumlah keterwakilan perempuannya 9,4% sedangkan keterwakilan laki-laki sebanyak 90,6%. Kemudian di kabupaten Merangin dan di Kota Sungai Penuh sama sekali tidak memiliki keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD pada periode 2019-2024. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih sangat kurang, tentunya di Provinsi Jambi. Berikut jumlah dan anggota DPRD menurut Kabupaten/Kota dan jenis kelamin di Provinsi Jambi periode 2019-2024:

Tabel 1.2 Jumlah Dan Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Jambi Periode 2019-2024.

No	Wilayah	Laki Laki	Perempuan	Total
1.	Provinsi Jambi	47	8	55
2.	Kota Jambi	37	8	45
3.	Kota Sungai Penuh	25	-	25
4.	Kabupaten Muaro Jambi	31	4	35
5.	Kabupaten Batanghari	26	9	35
6.	Kabupaten Tanjabtim	23	7	30
7.	Kabupaten Tanjabbar	28	7	35
8.	Kabupaten Sarolangun	31	4	35
9.	Kabupaten Merangin	34	1	35
10.	Kabupaten Tebo	34	1	35
11.	Kabupaten Bungo	31	4	35
12.	Kabupaten Kerinci	29	1	30
Total		377	53	430
Presentase		87,68%	12,32%	-

Sumber: DPRD Provinsi Jambi Tahun 2014 Dan Tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa keterwakilan perempuan di Provinsi Jambi masih sangat jauh jika dibandingkan dengan keterwakilan laki laki. Hal tersebut terlihat pada periode tahun 2014-2019 jumlah keterwakilan perempuan hanya 9,4% sedangkan keterwakilan laki-laki sebanyak 90,6%. Dan pada tahun 2019-2024 keterwakilan perempuan hanya sebanyak 12,32% dan keterwakilan laki-laki sebanyak 87,68%. Kemudian di Kota Sungai Penuh masih tidak memiliki keterwakilan perempuan. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya keterwakilan di bidang politik, khususnya di Provinsi Jambi.

Pemilu merupakan arena kontestasi politik antara pihak-pihak yang memperebutkan jabatan atau kekuasaan. Kompetisi yang terjadi dalam Pemilu bukan hanya persaingan antar partai, tetapi lebih menonjolkan figur dari kandidat

seperti ketokohan, popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan dan lain-lain. Modal ini yang dapat menjadi bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki kandidat dengan masyarakat yang memilihnya. Dalam hal untuk mencalon menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, pasti tidak lepas dari faktor modalitas individu itu sendiri, jika berbicara tentang modal politik, maka tidak dapat lepas dari teori sosiolog Pierre Bourdieu. Bourdieu merupakan sosiolog yang sangat bergaya eropa, yang tertarik pada adanya kelas sosial dan bentuk-bentuk ketimpangan di semua bidang⁸.

Menurut Bordieu modal bisa di golongan ke dalam empat jenis, yaitu: Pertama; modal ekonomi. Kedua; modal budaya. Ketiga; modal sosial Dan keempat; modal simbolik. Bagaimana posisi-posisi itu di tentukan? Menurut Boudieu posisi-posisi yang di miliki oleh individu di suatu ranah, itu di tentukan oleh alokasi modal atas para pelaku yang mendiami suatu ranah. Dari sinilah kita memandang bahwa hierarki dalam ruang sosial bergantung pada mekanisme distribusi dan di ferensiasi modal, yaitu seberapa besar modal yang di miliki (*volume* modal) dan struktur modal mereka. Melalui modal, individu dan masyarakat dapat di mediasi secara teoritik. Disatu sisi, masyarakat dibentuk oleh perbedaan distribusi dan penguasaan modal. Disisi lain, para individu juga berjuang memperbesar modal mereka. Hasil dari pembagian dan akumulasi modal inilah yang nantinya menentukan posisi dan status mereka di dalam masyarakat⁹.

Arena kontestasi Pemilukada di Provinsi Jambi tahun 2020, terdapat tiga bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan salah satu pasangan calon

⁸ John field, '*Modal Sosial*', (London: Kreasi Wacana Offset, 2010) hlm. 21.

⁹ Fauzi Fashari, Pierre Bourdieu, '*Menyingkapi Kuasa Simbol*', (Yogyakarta: Percetakan Jalasutra 2014) hlm. 107-109.

terdapat satu orang keterwakilan Perempuan, pasangan nomor urut 1 yaitu Cek Endra-Ratu Munawaroh, Ratu Munawaroh Adalah satu-satunya keterwakilan Perempuan dalam pilkada tahun 2020 di Provinsi Jambi. Berikut tabel pasangan yang maju menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Jambi:

Tabel 1.3 Daftar Peserta Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Beserta Perolehan Suara

NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PARTAI PENGUSUNG
Cek Endra Ratu Munawaroh	- 37,3%	- Golkar - PDI-P
Fachrori Umar Syafri Nursal,.	- 24,6%	- Gerindra - PPP - Hanura - Demokrat
Alharis Abdullah Sani	- 38,1%	- PKB - PAN - PKS

Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan *table* di atas terlihat ada tiga pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, yaitu Cek Endra-Ratu Munawaroh, Fachrori Umar-Syafri Nursal, dan Alharis–Abdullah Sani, dalam hal ini, peneliti memfokuskan kajian yaitu tentang modalitas Ratu Munawaroh yang mencalonkan sebagai calon Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020. Dimana Ratu Munawaroh adalah satu-satunya keterwakilan Perempuan dalam Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020, untuk itu, alasan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu, pada penelitian ini menarik untuk peneliti menganalisis bentuk modal yang dimiliki oleh Ratu Munawaroh sehingga pada pilkada Provinsi Jambi beliau

mampu mengalahkan petahana, walaupun perolehan suaranya masih pada urutan nomor dua. Kemudian dalam sejarah pemilihan umum secara langsung di Provinsi Jambi, perempuan yang pertama kali bisa lolos ke tahap calon wakil gubernur tercatat hanya Ratu Munawaroh saja. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis bentuk-bentuk modal yang dimiliki Ratu Munawaroh sehingga bisa sampai pada tahap calon gubernur pada pilkada Provinsi Jambi tahun 2020.

Modal sendiri merupakan sumber daya, dimana sumber daya tersebut telah dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu ranah. Kemudian sama-sama diketahui bahwa pada sebelumnya ia sudah dibekali oleh modal sosial yang cukup besar ia dapatkan, beliau sendiri sudah dikenal oleh masyarakat jambi sebagai istri dari almarhum Zulkifli Nurdin, dimana Zulkifli Nurdin adalah salah satu mantan Gubernur Provinsi Jambi yang sangat bersejarah, Zulkifli Nurdin pernah menjabat sebagai Gubernur Jambi selama dua periode, yaitu pada periode tahun 1999-2004 dan 2005-2010. Kepercayaan masyarakat di Provinsi Jambi terhadap keluarga Nurdin Hamzah cukup besar, terlihat jelas bahwa di Provinsi Jambi pengaruh Zulkifli Nurdin sangat kuat. bisa dilihat dari perjalanan Zulifli beserta keluarga Nurdin Hamzah di politik, dari menjadi ketua PAN, Hingga menjadi Gubernur Jambi dua periode, serta perannya yang mendominasi di PAN dari menjadikan adiknya Hazrin Nurdin sebagai ketua DPW PAN, lalu perannya menaikkan elektabilitas istri nya Ratu Munawaroh hingga duduk di kursi DPR-RI, kemudian perannya dalam memenangkan anaknya Zumi Zola di pemilihan Gubernur Jambi tahun 2015, hingga menjadikan adiknya Zumi yaitu Zumi Laza menjadi ketua

DPD PAN Kota Jambi tahun 2015. Itulah sedikit gambaran tentang kuatnya pengaruh Zulkifli Nurdin di provinsi Jambi.

Ratu Munawaroh juga sering tergabung dalam organisasi Sosial, pada saat almarhum suami menjabat sebagai Gubernur Jambi, Ratu Munawaroh menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi. Dan dia pernah terlihat aktif pada organisasi sosial lainnya. Seperti Yayasan Jami' AL- Fala Jambi, PERSANI Jambi, dan lainnya.

Jika melihat dari segi politik, Ratu Munawaroh juga memiliki pengalaman dalam berpolitik, dimana beliau pernah menjadi anggota DPR-RI fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Jambi pada masa jabatan 2009-2010, Kemudian beliau berhenti karena alasan kesibukan pribadi. Dan dari segi ekonomi, bisa dilihat diantara calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020, Ratu Munawaroh dan Cek Endra merupakan pasangan terkaya dibandingkan paslon yang lain. Berikut tabel harta kekayaan pribadi/pejabat Negara hasil penelitian atau hasil klarifikasi komisi pemberantasan korupsi pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020.

Tabel 1.4 Daftar Harta Kekayaan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JABATAN	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Cek Endra	Calon Gubernur	23.978.173.556
	Ratu Munawaroh	Calon Wakil Gubernur	30.036.303.682
2	Fachrori Umar	Calon Gubernur	4.795.203.665
	Syafril Nursal	Calon Wakil Gubernur	4.519.716.300
3	Al Haris	Calon Gubernur	4.714.441.791
	Abdullah Sani	Calon Wakil Gubernur	2.291.211.127

Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat bahwa kekayaan Ratu Munawaroh yang paling unggul diantara pasangan calon yang lain, kekayaan nya mencapai 30.036.303.682. hal tersebut menunjukkan bahwa selain memiliki modal sosial dan modal politik, Ratu Munawaroh juga memiliki modal ekonomi yang cukup besar.

Ratu Munawaroh berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. kemudian Ratu menikah dengan Zulkifli pada tanggal 24 agustus 1997. Warisan budaya dari keluarga Zulkifli Nurdin inilah yang memeriahkannya dalam Pilkada Jambi 2020, Dan bisa juga dilihat dari beberapa penghargaan yang diterima oleh Ratu Munawaroh seperti penghargaan Istri Setio Pendamping Suami, yang diberikan oleh Lembaga Adat Jambi, dan beberapa penghargaan lainnya. Itulah sedikit gambaran mengenai modal Budaya Ratu Munawaroh.

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji telah menghasilkan kesimpulan yang beragam sesuai dengan kajian penelitiannya yaitu: pertama penelitian yang dilakukan oleh Cici Safitri 2019, dengan judul Pengaruh Modal Sosial dalam Kemenangan Mahyeldi Ansyarullah-Hendri Septa pada Pilkada 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontestasi pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung memang sangat membuktikan sejauh mana aktor bersaing memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari sumber daya yang dimiliki aktor baik itu aktual ataupun potensial, ada beberapa bentuk-bentuk modal sosial dari hasil temuan peneliti yaitu: (1) figur atau kepribadian ditengah masyarakat Mahyeldi adalah seorang buya, mubalig, sederhana, dan Hendri dikenal anak muda yang berpendidikan luar negri serta merakyat. (2) hubungan dan jaringan keluarga Mahyeldi tergabung kedalam IKKA serta memiliki istri yang juga memiliki simpul-simpul sosial. Dan Hendri memiliki jaringan majelis taklim Ar-raudah (3) jabatan dan prestasi yang dimiliki Mahyeldi adalah seorang petahana dan Hendri seorang ketua partai. (4) organisasi sosial Mahyeldi tergabung dalam beberapa organisasi sosial.
2. Pemanfaatan modal sosial didalam ranah pemilihan kepala daerah kota padang tahun 2018 memang ada, ini dibuktikan pada beberapa kegiatan-kegiatan, perkumpulan yang dilakukan oleh Mahyeldi dan Hendri. Hal tersebut memang dilakukan dikarenakan modal sosial

merupakan investasi sosial yang juga lahir secara alamiah dan terorganisir dari habit dan *field* dan di manfaatkan oleh Mahyeldi dan Hendri¹⁰.

Kedua penelitian yang di lakukan oleh Ratnia Solihah 2018, dengan judul Relasi Modal dalam Kontestasi Politik studi pada pasangan Jeje-Adang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dapat dilihat hasil penelitiannya adalah:

1. Modal Politik

Dukungan Partai Politik atau koalisi Partai terhadap Pasangan Jeje-Adang, kepemilikan Jabatan-jabatan Politisi berupa dimilikinya kapasitas dan pengalaman politik serta posisi strategis dan kedudukan politik pasangan Jeje-Adang. Tindakan politik pasangan Jeje-Adang yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik. Kontrak politik pasangan Jeje-Adang dalam Pilkada. Serta perannya tim sukses pasangan Jeje-Adang beserta strategi politik pemenangan yang dijalankan untuk meraih kemenangan.

2. Modal Ekonomi

Perolehan dana pasangan Jeje-Adang bersumber pada dukungan dari pribadi, partai politik, sumbangan, dan lain-lain, Perolehan dana yang bersumber pada kepemilikan perusahaan pasangan Jeje-Adang dan/atau tim sukses, dan penggunaan dana kampanye Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2015.

¹⁰Cici Safitri, 'Pengaruh Modal Sosial dalam Kemenangan Mahyeldi Ansyarullah-Hendri Septa pada Pilkada 2018', Skripsi Prodi Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019.

3. Modal Sosial

Dukungan figur pasangan Jeje-Adang karena ketokohnya, kepihilitas, dan integritasnya, kemudian adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pasangan Jeje-Adang, interaksi sosial antara pasangan Jeje-Adang dengan pendukungnya, serta jaringan-jaringan sosial yang mendukung pasangan Jeje-Adang¹¹.

Dengan melihat penelitian terdahulu banyak yang mempelajari tentang modalitas dengan menganalisis modal-modal tersebut dalam perannya dikontestasi politik. Berkaitan dengan tema ini, maka penelitian ini mencoba mengkaji tentang modal politik yang dimiliki Ratu Munawaroh sebagai kandidat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, sehingga bisa membuatnya maju dalam kontestasi politik dalam pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Jambi tahun 2020. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin membeda lebih lanjut penelitian ini dengan memakai teori Bourdieu tentang empat Modalitas. Menurut penulis teori ini sangat cocok dipakai karena berkaitan erat dengan modalitas. Namun, meskipun penelitian ini memfokuskan modal politik, penelitian ini tidak bermaksud mengaitkan kekalahan ataupun kemenangan dari calon kandidat, karena penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana perjuangan politisi yang bisa memiliki modalnya sehingga bisa mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan Gubernur Provinsi Jambi 2020.

Pertarungan dalam arena harus memiliki modal, dan strategi dalam menggunakan modal tersebut sehingga bisa memperoleh posisi yang diinginkan

¹¹ Ratnia Solihah, '*Relasi Modal Dalam Kontestasi Politik*', Skripsi Prodi Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2018.

dalam arena itu¹². Dari latar belakang diatas, dapat dilihat fenomena yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang modalitas Ratu Munawaoh dalam mencalonkan sebagai wakil Gubernur Provinsi Jambi dalam Pilkada Provinsi Jambi 2020 dengan judul **“MODALITAS RATU MUNAWAROH DALAM MENGHADAPI PILKADA PROVINSI JAMBI TAHUN 2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam menyusun proposal skripsi Modalitas Ratu Munawaroh dalam Menghadapi Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020, rumusan masalah yang diajukan adalah:

Modalitas apa saja yang dimiliki Ratu Munawaroh Dalam Menghadapi Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diidentifikasi, yang tujuannya yaitu:

Untuk menganalisis bentuk modal apa saja yang dimiliki Ratu Munawaroh dalam Menghadapi Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut, maka ada beberapa kegunaan (manfaat) yang dapat diambil antara lain:

¹²Ika kartika, ‘*Modal Kandidat Perempuan Dalam Pilkada Tahun 2017*’, (Universitas Padjajaran Bandung: Jurnal Tapis, volume. 15 no. 05, Januari-Juni 2019), hlm 95.

1.4.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahkan kajian khususnya kajian Ilmu Politik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti bisa mengetahui modalitas apa saja yang dimiliki Ratu Munawaroh dalam kontestasi politik Pilkada Provinsi Jambi 2020.

1.4.3. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dalam tataran yang luas dapat menjadi masukan bagi para aktivis politik dan sebagai inspirasi sehingga memahami bahwa posisi yang diraih oleh kandidat dalam Pemilukada, tidak bisa diperoleh melalui "jalan pintas" tapi untuk mencapai posisi tersebut perlu adanya modalitas yang dimiliki sehingga bisa menempati posisi penting. Selain itu juga penelitian ini dapat memberikan sari bagi penelitian-penelitian tentang perkembangan politik khususnya mengenai modalitas dalam proses politik Indonesia pasca reformasi 1998.

1.5. Landasan Teori

Landasan teori merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai perilaku pemilih, faktor perilaku pemilih dan Pemilihan umum.

1.5.1. Habitus

Konsep habitus berasal dari tradisi pemikiran filsafat, dalam bahasa latinnya, habitus bisa berarti kebiasaan (*habitual*), penampilan diri (*appearance*) atau bisa pula menunjuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh. Sedangkan dalam literatur logika dan epistemologi, istilah habitus dipakai guna menunjukkan aspek perlengkapan bagi substansi tertentu¹³. Habitus pada seseorang/individu bisa dilihat seperti sifat-sifat elok serapan, sikap tenang, kecantikan, dan sebagainya.

Dalam pengertian bourdieu, habitus sebagai perlengkapan dan postur sebagai posisi tubuh/fisik, juga kualitas sebagai sifat-sifat yang menetap dalam diri, tidak dapat dipilah karena perlengkapan menghasilkan postur yang lama-kelamaan membentuk sifat yang relatif menetap. Bahkan kategori relasio sebagai peran dari substansi, aksio sebagai tindakan aktif dari substansi, dan passio sebagai reaksi dari aksi di luar diri pun terkait secara erat dan tak terpisahkan dari ketiga kategori tadi. Habitus membimbing aktor untuk memahami, menilai, mengapresiasi tindakan mereka berdasarkan pada skema pola yang dipancarkan pada dunia sosial. Sebagai skema klasifikatif, habitus menghasilkan perbedaan gaya hidup dan praktik-praktik kehidupan. Skema ini diperoleh dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan individu-individu lain maupun lingkungan dimana ia berada. Sekumpulan pola yang terinternalisasi tersebut mencakup berbagai prinsip klasifikasi, entah itu; baik-buruk, sehat-sakit, benar-salah, masuk

¹³ Fauzi Fashri, *Op. Cit.* hlm. 93.

akal-tidak masuk akal, atas-bawah, depan-belakang, indah-jelek, bermanfaat-tidak bermanfaat, dan lainnya¹⁴.

Habitus adalah sistem yang berisi disposisi-disposisi. Disposisi-disposisi itu diperoleh lewat masa belajar yang implisit maupun eksplisit. Habitus berfungsi seperti suatu sistem yang berisi skema-skema generator. Habitus merupakan sesuatu yang kita peroleh. Tetapi, sesuatu itu terreinkarnasi secara awet dalam tubuh dalam bentuk beberapa disposisi permanen. Jadi, konsep habitus secara konstan mengingatkan bahwa konsep itu direferensiasikan kepada sesuatu yang bersifat historis, dimana sesuatu itu terkait dengan sejarah individual. Habitus juga merupakan adaptasi. Habitus terus melakukan penyesuaian kepada dunia yang hanya secara ekspesional hadir dalam bentuk suatu konversi radikal¹⁵.

1.5.2. Ranah

Konsepsi ranah yang digunakan Bourdieu, hendaknya tidak dipandang sebagai ranah yang berpagar di sekelilingnya atau dalam pengertian domain amerika, melainkan lebih sebagai ‘ranah kekuatan’. Ranah merupakan ranah kekuatan yang secara parsial bersifat otonom dan juga merupakan suatu ranah yang di dalamnya berlangsung perjuangan posisi-posisi¹⁶.

Ranah bukanlah interaksi intersubjektif antar individu, melainkan hubungan yang terstruktur dan secara tidak sadar mengatur posisi individu, kelompok atau lembaga dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara

¹⁴*Ibid*, hlm. 100.

¹⁵Pierre Bourdieu, ‘*Pertanyaan-Pertanyaan Sosiologi*’, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), Diterjemahkan Oleh: Stephanus Aswar Herwinarko, hlm. 226.

¹⁶Richard Harker dkk, ‘*(Habitus X Modal + Ranah = Praktik*’, (Yogyakarta: JALASUTRA, 2009), hlm. 9.

spontan¹⁷. Bourdieu mendefinisikan ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperoleh sumber daya (modal) dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Ranah juga merupakan arena pertarungan dimana mereka yang menempatnya dapat mempertahankan atau mengubah konfigurasi kekuasaan yang ada. Struktur ranahlah yang membimbing dan memeberikan strategi bagi penghuni posisi, baik individu maupun kelompok, untuk melindungi atau meningkatkan posisi mereka dalam kaitannya dengan jenjang pencapaian sosial. Apa yang mereka lakukan berdasarkan pada tujuan yang paling menguntungkan bagi produk mereka sendiri. Strategi-strategi agen tersebut bergantung pada posisi-posisi mereka dalam ranah¹⁸.

Konsep ranah tak bisa dilepaskan dari ruang sosial (*social space*) yang mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial. Konsep ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu topologi (ruang). Artinya, pemahaman ruang sosial mencakup banyak ranah di dalamnya yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Sistem ranah juga dapat dianalogikan dengan sebuah sistem planet yang memiliki gaya gravitasi, mengundang energi, dan memiliki semacam atmosfer yang bisa melindungi dari gaya rusak yang datang dari luar planet. Dengan kata lain setiap ranah memiliki struktur dan kekutan-kekuatan tersendiri, serta ditempatkan dalam suatu ranah yang lebih besar yang juga memiliki kekuatan, strukturnya sendiri dan seterusnya. Dalam suatu ranah, terdapat pertarungan, kekuatan-kekuatan, dan orang yang memiliki modal besar dan orang yang tidak memiliki modal. Dalam ranah

¹⁷Fauzi Fashri, *Op. Cit.* hlm. 105.

¹⁸*Ibid*, hlm. 106.

intelektual, anda harus memiliki modal yang istimewa dan spesifik, yaitu otoritas, *prestise*, dan sebagainya. Konsep ranah mengandaikan hadirnya berbagai macam potensi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam posisi-posisinya masing-masing. Tidak saja sebagai arena kekuatan, ranah juga merupakan domain perjuangan memperoleh posisi-posisi di dalamnya. Bagaimana posisi-posisi tersebut ditentukan oleh alokasi modal atas para pelaku yang mendiami suatu ranah. Dari sinilah kita memandang bahwa hierarki dalam ruang sosial bergantung pada mekanisme distribusi dan diferensiasi modal, yaitu seberapa besar modal yang dimiliki (*volume* modal) dan struktur modal mereka¹⁹.

1.5.3. Modal

Istilah modal digunakan oleh Bourdieu untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Meski istilah modal sering digunakan dalam ilmu ekonomi, tidak berarti Bourdieu jatuh kedalam pandangan ekonimisme, menurut Bourdeu istilah modal memuat beberapa ciri penting, yaitu: (1) Modal terakumulasi melalui investasi, (2) Modal bisa diberikan kepada yang lain melalui warisan. (3) modal dapat memberi keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan penempatannya. Ide Bourdieu tentang modal lepas dari pemahaman dalam tradisi marxian dan juga dari konsep ekonomi formal. Konsep ini mencakup kemampuan melakukan kontrol terhadap masa depan diri sendiri dan orang lain. Ia merupakan pemusatan segala kekuatan dan hanya bisa ditemukan dalam sebuah ranah, melalui modal, individu dan masyarakat dapat dimediasi secara teoritik. Di satu sisi, masyarakat

¹⁹*Ibid.* hlm, 106-108.

dibentuk oleh perbedaan penguasaan modal. Di sisi lain individu juga memperbesar modal mereka. Hasil dari pembagian akumulasi modal inilah yang nantinya menentukan posisi dan status mereka dalam masyarakat. Modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang, baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempersentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Jenis-jenis modal apa saja yang tersebar di dalam ranah sosial? Merujuk Bourdieu, modal bisa di golongankan ke dalam empat jenis, yaitu²⁰: Pertama, modal ekonomi yang mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda), dan uang. Modal ekonomi sekaligus juga berarti modal yang secara langsung bisa ditukar atau dipaten kan sebagai hak milik individu. Modal ekonomi merupakan jenis modal yang relatif paling independen dan fleksibel karena modal ekonomi secara mudah bisa digunakan atau ditransformasikan kedalam arena-arena lain serta fleksibel untuk diberikan atau diwariskan pada orang lain. Kedua, modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Modal budaya mengimplisitkan suatu proses pembelajaran sehingga tidak bisa begitu saja diberikan kepada orang lain, ketiga, modal sosial atau jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. keempat, segala bentuk *prestise*, status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk modal

²⁰ *Ibid.* hlm.108-109.

simbolik. Beragam jenis modal tersebut di atas, oleh Bourdieu dapat dipertukarkan dengan jenis-jenis modal lainnya. Masing masing jenis modal didapat dan diakumulasikan dengan saling diinvestasikan dalam bentuk-bentuk modal lain atau yang disebut nya sebagai rekonversi modal. Penentuan hirarki dan diferensiasi masyarakat tergantung pada jumlah modal yang diakumulasi dan struktur modal itu sendiri. Seseorang yang menguasai, keempat modal sekaligus pasti akan menduduki hirarki tertinggi dan memperoleh kekuasaan yang besar (kelas dominan), sementara yang hanya menguasai beberapa modal saja dari keseluruhan modal menempati posisi hirarki sebagai kelas menengah yang tidak menguasai satu modal pun menempati posisi hirarki terendah. Meskipun memiliki peran penting dalam praktik, modal-modal tersebut tidak secara otomatis memiliki kekuatan yang signifikan di dalam suatu arena. Setiap arena memiliki kebutuhan modal spesifik yang sangat mungkin berbeda dengan kebutuhan arena lain²¹.

a. Modal Sosial

Modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seseorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan²². Modal sosial menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kekuasaan. Modal sosial bukanlah modal kekayaan atau uang, modal sosial adalah relasi yang di bangun serta kepercayaan yang dimiliki oleh

²¹Kukuh Yudha Karnanta, 'Paradigma Teori Arena Produksi Kultural, Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu', (Universitas Airlangga: Jurnal Poetika, Volume. 1 No 1, Juli 2013), hlm. 11.

²²John Field, *Op. Cit.* hlm. 23.

antara calon politisi dengan masyarakat. Termasuk sejauh mana calon politisi tersebut meyakinkan masyarakat terhadap kemampuan yang di miliki sehingga masyarakat bisa memilihnya²³.

Menurut Bourdieu kita harus mengkonstruksi objek yang disebutnya sebagai modal sosial untuk melihat bahwa kehidupan duniawi yang mewah merupakan aktivitas utama bagi beberapa orang yang kekuasaan dan otoritas mereka dibangun di atas modal sosial. Modal sosial bisa membuat kita langsung melihat bahwa pesta koktail para pemimpin penerbitan atau pesta yang diadakan untuk tukar informasi dalam lapangan intelektual adalah ekuivalen dengan kerja mewah keduniawian kaum aristokrat. Usaha yang dibangun di atas modal sosial harus menjamin terus berlangsungnya reproduksinya sendiri lewat suatu bentuk spesifik kerja-meresmikan monumen memimpin acara karya amal, dan semacamnya²⁴.

b. Modal Ekonomi

Modal ekonomi adalah yang mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh,) materi/pendapatan dan benda, dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta di wariskan dari satu generasi ke generasi lainnya²⁵. Modal ekonomi adalah akar dari semua jenis modal lain. Modal ekonomi memiliki makna yang sangat penting sebagai penggerak mesin politik yang dipakai. Dalam kampanye misalnya, tentu dalam kampanye membutuhkan uang

²³RizkiMaharani, Mudiwati Rahmatunnisa & Leo Agustino, '*Modalitas RA.Anita Noeringhati pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019*, (Universitas: Padjajaran Bandung, JUPIIS, 12 februari 2020), hlm. 491.

²⁴Pierre Bourdieu, *Op.Cit.* hlm. 94.

²⁵Fauzi Fashri, *Op.Cit.* hlm. 109.

yang cukup besar untuk membiayai berbagai kebutuhan, contohnya seperti mencetak poster, spanduk, iklan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.

Modal politik dan modal ekonomi saling berkaitan dalam konteks politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju Pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional. Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk pemenangan pilkada²⁶.

c. Modal Budaya/kultural

Pierre Bourdieu menyatakan bahwa modal budaya merupakan keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, termasuk modal budaya antara lain seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan atau keahlian tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk gelar kesarjanaan), bentuk-bentuk bahasa dan lain-lain. Individu memperoleh modal budaya ini sejak ia kecil dimana modal ini sudah terbentuk dan terinternalisasi secara sendiri, salah satu bentuknya melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa modal budaya ini dibentuk sendiri oleh lingkungan sosial yang beranekaragam serta

²⁶Stella Maria Ignasia Pantouw, *'Modalitas Dalam Kontestasi Politik'*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2012.

pendidikan yang diperoleh individu tersebut, pendidikan tersebut bisa berupa pendidikan formal maupun warisan budaya dari keluarga²⁷. Modal kultural/budaya itu adalah modal yang diwarisi. Dan propietas modal kultural adalah bahwa modal itu merupakan suatu modal yang terinkorporasi (ditubuhkan), sehingga modal kultural memang kelihatan natural, bawaan lahir.

d. Modal Simbolik

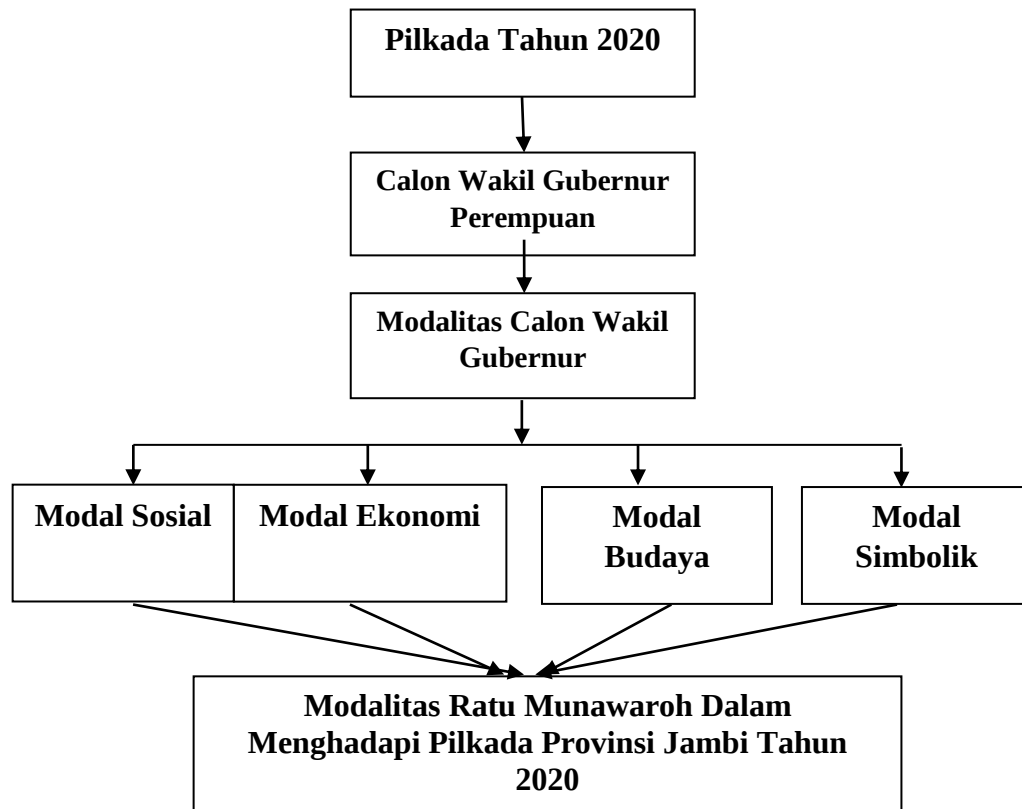
Modal simbolik mengacu pada segala bentuk derajat akumulasi prestise, status, konsekrasi atau kehormatan, otoritas dan legitimasi dan dibangun di atas dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengenalan (*reconnaissance*)²⁸. Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik maupun dan ekonomi, berkait akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik bisa berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan sopirnya, namun bisa juga petunjuk-petunjuk yang tidak mencolok mata yang menunjukkan status tinggi pemiliknya. Misalnya, gelar pendidikan yang dicantumkan di kartu nama, cara bagaimana membuat tamu menanti, cara mengafirmasikan otoritasnya.

²⁷Fauzi Fashri, *Op. Cit.* hlm. 109.

²⁸*Ibid*, hlm. 109.

1.6. Kerangka Pikir

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Modalitas Ratu Munawaroh dalam Menghadapi Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020. tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui modal apa saja yang dimiliki Ratu Munawaroh sehingga bisa mengikuti kontestasi politik Provinsi Jambi yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif, fokus penelitian untuk mencapai tujuan melalui uji teori, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen pokok yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan penelitian, sehingga peneliti harus berbekal teori dan wawasan yang luas agar dapat melakukan wawancara secara langsung, menganalisis objek yang diteliti agar lebih jelas²⁹.

Penelitian ini diarahkan untuk memahami fakta dan argumen yang tepat. Tujuannya adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta

1.7.2. Lokasi/Objek Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Provinsi Jambi, karena sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Modalitas Ratu Munawaroh Dalam Menghadapi Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020.

1.7.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, Maka fokus penelitian ini adalah Modalitas Ratu Munawaroh dalam Menghadapi Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020. Dalam Pilkada tahun 2020, Ratu Munawaroh adalah satu-satunya keterwakilan Perempuan, maka peneliti ingin memfokuskan penelitian tentang

²⁹Herdani dkk, ' *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* ', (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 40.

modalitas apa yang dimiliki Ratu Munawaroh dalam menghadapi Pilkada 2020. Dilihat dari kondisi geografis Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki 9 Kabupaten. Maka dari itu untuk memfokuskan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini akan dilakukan di Kota Jambi, yang merupakan Ibukota Provinsi Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data kalau digolongkan menurut sumbernya dibagi menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer. Adapun penjelasan dari kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a.) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (responden) atau data pokok yang didapatkan dilapangan, instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu pedoman wawancara.

b.) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti biro pusat statistik, departemen pertanian dan sebagainya. Yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, *Purposive*

sampling adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis, Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif³⁰.

Tabel 1.5 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Ratu Munawaroh	Calon Wakil Gubernur Pilkada Jambi Tahun 2020
2	Tim Pemenangan Cek Endra-Ratu Munawaroh	1 Orang
3	DPW Golkar	1 Orang
4	DPW PDI-P	1 Orang
5	Pengamat Politik	1 Orang
6	Masyarakat Yang Dipilih Melalui Berbagai Profesi.	4 Orang
1)	Katamso Syafe'i Ahmad, Kabid Bidang Promosi Dinas PTMPTSP Provinsi Jambi.	Merupakan Mantan Wakil Bupati Tanjabbar, dan Mantan Ajudan Suami Ratu Munawaroh, yaitu Bapak Zulkifli Nurdin.
2)	Iwan, yang Berprofesi Sebagai Tukang Ojek di Pasar Angso Duo Kota Jambi. Dan Juga Merupakan Panwascam Kecamatan.	Pada Saat Ratu Munawaroh Mendampingi Bapak Zulkifli Nurdin, beliau sering berinteraksi dengan masyarakat di Pasar Angso Duo Kota Jambi.
3)	Oetri, yang Berprofesi Sebagai Penjual Sayuran Di Pasar Angso Duo Kota Jambi.	Pada Saat Ratu Munawaroh Mendampingi Bapak Zulkifli Nurdin, beliau sering berinteraksi dengan masyarakat di Pasar Angso Duo Kota Jambi.
4)	Yusuf, yang Berprofesi Sebagai Penjual Sayuran Di Pasar Angso Duo Kota Jambi.	Pada Saat Ratu Munawaroh Mendampingi Bapak Zulkifli Nurdin, beliau sering

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta CV, 2011) hlm. 48.

	berinteraksi dengan masyarakat di Pasar Angso Duo Kota Jambi.
--	---

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a.) Observasi

Teknik pengumpulan data yang pertama kali digunakan adalah observasi. Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis, terhadap gejala-gejala yang diteliti, menurut Sukma Dinata, observasi atau pengamatan adalah suatu teknik cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung³¹.

b.) Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen³².

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*),

³¹ Herdani dkk, *Op. Cit.* hlm. 124.

³² *Ibid*, hlm. 149.

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnyakarya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif³³.

c.) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

1.7.7. Teknis Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman, yang mana analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa:

data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin ^{telah} dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas³⁴.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan data adalah sebagai berikut:

³³ *Ibid*, hlm. 150.

³⁴ *Ibid*, hlm. 163.

a.) Reduksi Data

Langkah paling awal dalam melakukan pengelolaan data adalah reduksi data, adapun pengertiannya yaitu:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung³⁵.

b.) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan alur kedua yang penting setelah reduksi data. Penyajian data dapat diartikan sebagai:

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut³⁶.

c.) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data pada tahap ketiga yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori³⁷.

1.7.8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Pada penelitian kualitatif, metode penelitian yang terakhir yaitu keabsahan data atau triangulasi data. Triangulasi data berarti:

³⁵ *Ibid*, hlm. 164.

³⁶ *Ibid*, hlm. 167-168.

³⁷ *Ibid*, hlm. 171.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data³⁸.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data sumber untuk menguji keabsahan data yang diperoleh melalui informan yang satu dengan informan yang lainnya. Dengan melakukan pengamatan antara data yang telah didapatkan dengan hasil wawancara, sehingga peneliti mendapatkan informan yang sebenarnya tentang fenomena yang terjadi dilapangan.

³⁸ *Ibid*, hlm. 154.